

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Politik Uang dalam Perspektif Budaya Politik Partisipan di Masyarakat Kabupaten Bekasi pada Pilkada 2024**”, dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya praktik politik uang (*money politics*) yang masih terus membayangi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Di tengah tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bekasi, praktik politik uang kerap dihadapkan pada dilema antara pragmatisme ekonomi dan norma budaya politik yang berkembang di masyarakat. Perubahan dinamika pilihan pemilih serta bentuk adaptasi komunikasi masyarakat terhadap godaan transaksi politik menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji karena menunjukkan sejauh mana budaya politik partisipan telah terinternalisasi secara kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manifestasi praktik politik uang serta mengkaji perspektif budaya politik partisipan masyarakat Kabupaten Bekasi dalam merespons politik uang pada Pilkada 2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilih aktif, pengawas pemilu, dan pengamat politik lokal, serta didukung oleh studi dokumentasi yang berasal dari media massa, media sosial, jurnal ilmiah, dan berbagai dokumen laporan pelanggaran Pilkada terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan Teori Budaya Politik Almond dan Verba sebagai teori utama dan didukung oleh Teori Pilihan Rasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena politik uang di Kabupaten Bekasi pada Pilkada 2024 mengalami pergeseran pola, dari kuatnya identitas masyarakat lokal menjadi masyarakat yang mulai hidup berdasarkan prinsipnya masing-masing. Masyarakat Kabupaten Bekasi menunjukkan karakter yang dualistik; di satu sisi masyarakat partisipan lain memiliki tingkat kesadaran dan kehadiran politik yang tinggi, namun di sisi lain sebagian masyarakat masih merasionalkan penerimaan politik uang sebagai bentuk penyerapan "kesejahteraan jangka pendek". Penelitian ini juga menemukan bahwa kegiatan di lingkungan masyarakat menjadi komunikasi atau juga pengaruh utama dan media sosial berperan penting sebagai instrumen pendidikan politik independen serta ruang pengawasan partisipatif dalam menolak dan mengkritisi praktik politik uang.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan budaya politik partisipan di Kabupaten Bekasi, belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Meskipun pemahaman mendasar terhadap politik di masyarakat tergolong cukup, namun perlu ada penanaman nilai-nilai sehingga masyarakat tidak hanya memahami namun juga mampu mengkritisi pilihan dan implikasi nya.

Kata kunci: Politik Uang, Budaya Politik Partisipan, Pilkada 2024, Kabupaten Bekasi, Demokrasi Lokal.